

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SISTEM KELAS TUNTAS  
BERKELANJUTAN (DI SMK NEGERI 2 SOMBA OPU)  
KABUPATEN GOWA**

Disusun oleh dan diusulkan oleh:

Ruswan

Nomor Stambuk : 105640168712



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SISTEM KELAS TUNTAS  
BERKELANJUTAN (DI SMK NEGERI 2 SOMBA OPU)  
KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh  
Ruswan  
Nomor Stambuk : 105640168712

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di  
KAB. Gowa ( SMKN 1 Somba Opu )

Nama : Ruswan

Nomor Stambuk : 105640168712

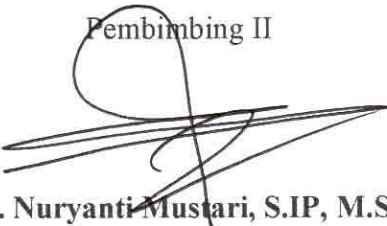
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

### Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Pembimbing II

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

### Diketahui Oleh:

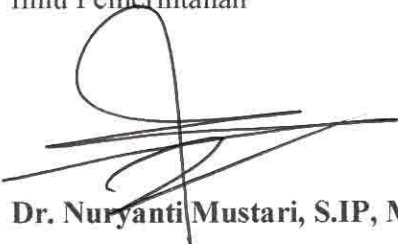
Dekan,

Fisip Unismuh Makassar

  
Dr. Hj. Nuryanti Malik S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan,

Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis Tanggal 7 february Tahun 2019.

## TIM PENILAI

**Ketua**

**Sekretaris**



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

## Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)



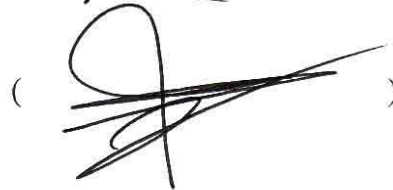
2. Dr. Muhammad Tahir M.Si



3. Abdul Kadir Adys, SH., MM



4. Dr. Nuryanti Mustari, S.ip., M.Si



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ruswan

Nomor Stambuk : 105640168712

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2019  
Yang Menyatakan



Ruswan

## ABSTRAK

**Ruswan. Implementasi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa. dibimbing oleh Alimuddin Said dan Nuryanti Mustari.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola pola kemitraan pemerintah daerah kabupaten gowa dengan masyarakat dalam mewujudkan program sistem kelas tuntas berkelanjutan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa. Dari hasil wawancara 3 orang dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan informan tentang pola kemitraan pemerintah daerah kabupaten gowa dengan masyarakat dalam mewujudkan program sistem kelas tuntas berkelanjutan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa.

Program SKTB yang diterapkan pemerintah Kab. Gowa untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kab. Gowa telah dipahami maksud dan tujuannya oleh pendidik dan peserta didik sehingga proses belajar mengajar terkhusus di SMP Negeri 1 Pallangga berjalan dengan baik dan lancar. Pemahaman peserta didik mengenai kewajiban menuntaskan setiap KD yang telah ditentukan membuat mereka tidak terbebani ketika diberikan remedial yakni dengan diberikan tugas untuk menuntaskan pembelajaran yang tertinggal. Tujuan belajar peserta didik bukan lagi berhasil melalui ujian semester untuk kemudian menjadi syarat naik kelas, dengan penerapan SKTB tujuan belajar peserta didik beralih bagaimana caranya untuk berhasil menuntaskan KD yang telah ditetapkan tanpa dihantui rasa takut tidak naik kelas. SKTB menjadi program unggulan pemerintah Kab. Gowa dibidang pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas secara intelektual, cerdas spritual dan cerdas secara emosional, yang kemudian menjadi bekal menghadapi persaingan di era globalisasi ini

Disarankan kepada pendidik untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya terkhusus mengenai kemampuan dan pemahaman terhadap SKTB, serta selalu memberikan pemahaman kepada peserta didik dan orangtua peserta didik mengenai fungsi dan tujuan dari SKTB. Setiap pendidik diharapkan selalu saling bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Selain itu, dalam meningkatkan kompetensi maka setiap peserta didik agar lebih sering mengikuti berbagai pelatihan yang ada, yang dapat melatih atau meningkatkan kemampuan mereka

Kata Kunci : *Implementasi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga proposal penelitian ini yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa” dapat di selesaikan oleh penulis walaupun jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Alimuddin Said, M.Pd sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian proposal penelitian ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Abd. Rahman Rahim, M.Si
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si yang telah membina Jurusan Ilmu Pemerintahan

4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang membantu penulis berupa materi maupun non materi.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman kelas ilmu yang banyak memberi ide atau pikiran kritikan yang bersipat membangun.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar, Januari 2019

Ruswan



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Implementasi.....	12
1. Pengertian Implementasi.....	12
2. Variabel dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	13
B. Konsep Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).....	19

1. Sistem Pembelajaran.....	19
2. Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	20
3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	23
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Informan.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 39
A. Gambaran Objek Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	39
2. Gambaran Umum SMKN 2 Somba Opu.....	40
B. Implementasi SKTB.....	42
1. Sosialisasi SKTB.....	42
2. Pemenuhan Dana Yang Cukup Untuk Menyelenggarakan SKTB.....	44

3. Kesiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	45
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....	48
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat/Mendukung implementasi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa .....	50
1. Faktor Yang Mendukung Pelaksanaan SKTB .....	50
a. Komitmen Stakholder Terkait.....	50
b. Koordinasi Antara Pengawas dan Pelaksana .....	53
c. Kontrol Politik .....	54
d. Kontrol Organisasi.....	56
e. Respon Positif Dari Sekolah dan Orang Tua Siswa.....	57
2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan SKTB .....	60
a. Etos Kerja Dari Pendidik Yang Sangat Beragam .....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62

#### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya ketika memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. oleh karena itu dibutuhkan ketulusan dan hati nurani masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial , ras , etnis , agama dan gender. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa : 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dye dalam Nawawi (2009) Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dan kebijakan baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan suatu kebijakan harus di evaluasi, untuk mendapat *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan, sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dinamika *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum nampak.

Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu yang dimaksud

dengan evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Menurut Mustopadidjaja (2002) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik, oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu

Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat *survive* didalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyatannya adalah dewasa ini bangsa indonesia dilanda dan masih berada ditengah-tengah krisis yang menyeluruh. Kita dilanda Oleh Krisis Politik, Krisis Ekonomi, Krisis Hukum, Krisis Kebudayaan, dan tidak dapat disangkal juga di dalam bidang Pendidikan. Pendidikan tidak lepas dari politik sungguhpun pendidikan tidak dapat

menggantikan fungsi politik. Kenyataannya ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi dan peranan pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum dan kebudayaan pada umumnya. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana. Merespon fakta pendidikan saat ini Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang Pendidikan, salah satu kebijakan program Pendidikan Ichsan Yasin Limpo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diterapkan di Kabupaten Gowa adalah Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah yang dijadikan sebagai desentralisasi pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang selanjutnya di undang-undangkan dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 menegaskan urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan juga keamanan yang terjaga, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial menjadi tanggung jawab daerah yang harus mengurusinya.

Salah satu tujuan wajib pemerintah daerah yaitu dalam hal pendidikan , hal ini sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam suatu daerah. Melalui sektor pendidikan ini daerah bisa berkembang, maju, kompetitif, dan sejahtera ketika dapat membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan local

Kebijakan pendidikan dapat dijadikan skala prioritas dalam pembangunan suatu daerah yang nantinya akan mampu mencetak SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas mampu membawa daerahnya ke era persaingan baik itu dalam taraf nasional maupun global. Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut *knowledge driven economic growth*. Konsep ini menempatkan lembaga pendidikan pada posisi yang strategis sebab dapat (1) melahirkan tenaga-tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar , teknisi, dan



manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan menciptakan inovasi teknologi; (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal

Maka sangat pentinglah sebuah inovasi kebijakan pendidikan dalam suatu daerah menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi ini. Saat ini Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan, salah satu kebijakan program pendidikan Ichsan Yasin Limpo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diterapkan di Kabupaten Gowa adalah SKTB dan oleh karena itu sampai saat ini program SKTB masih dijalankan oleh pemerintah kabupatengowa.

SKTB merupakan singkatan dari Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (*Automatic Promotion*), SKTB disosialisasikan pada tahun 2011 dimana pelaksanaannya pada tahun 2012 dan pada 2013 dilaksanakan secara keseluruhan disemua tingkatan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Sebagai langkah awal, SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa.

Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan (SPKTB) adalah sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan secara komprehensif dan tuntas anak didik dan dibutuhkan peranan

penting dari pemerintah, menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam belajar, memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, khusus anak didik di kabupaten Gowa.

Kebijakan tersebut ditempuh karena pemerintah daerah kabupaten Gowa Sulawesi Selatan menyadari bahwa sistem pendidikan, terutama pendidikan dasar adalah pondasi dari semua jenjang pendidikan yang ada, yang tersebar dari kota hingga pelosok desa terpencil seharusnya memiliki kekuatan dalam mengembangkan berbagai aspek kemampuan diri peserta didik untuk hidup sebagian anggota masyarakat yang produktif. Juga disadari bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya.

SKTB adalah kebijakan program pendidikan yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai dengan SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dan juga ditunjang oleh kemampuan anak didik tersebut, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dan membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh

(kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.

Keunggulan sistem SKTB sendiri yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, selain itu peserta didik dapat lebih cepat menyelesaikan sistem kredit semester sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk keperluan pribadi dapat hemat. SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia.

SKTB sendiri yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, selain itu peserta didik dapat lebih cepat menyelesaikan sistem kredit semester sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk keperluan pribadi dapat hemat. SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik

yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia

Pada SKTB terdapat pula yang dinamakan pembelajaran remedial, pembelajaran remedial yang dimaksud adalah beberapa kompetensi yang belum dituntaskan dapat diulang tanpa harus mengulang semua kompetensi yang telah dituntaskan. Dampak dengan adanya penerapan SKTB dalam hal program tidak mengenal tinggal kelas bagi siswa dapat menyebabkan kualitas pendidikan semakin menurun, minat belajar siswa menjadi menurun apalagi siswa yang pada dasarnya sudah malas, keinginan untuk rajin ke sekolah juga berpengaruh karena sudah ada tertanam dalam pemikiran mereka adanya jaminan naik kelas, selain itu kualitas dan kreatifitas para guru juga berbeda-beda ada sehingga mempengaruhi dalam pencapaian keberhasilan SKTB.

Dalam penerapannya ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan SKTB yang belum terlaksana dengan baik yaitu berdasarkan data penelitian Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya).

Beberapa guru kurang paham dan sering terhambat dalam penyusunan Rencana Penyusunan Pembelajaran (RPP), sehingga kemampuan dalam mengembangkan media dan bahan ajar menjadi lemah, selain itu beberapa guru memiliki sifat malas dan kurangnya motivasi terkadang menyebabkan kurang maksimalnya persiapan dalam proses belajar. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kualitas siswa, karena guru memiliki peran yang sangat besar

terhadap perkembangan kemampuan seorang siswa dan dalam mencapai keberhasilan program SKTB.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat pada latar belakang maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat/mendukung implementasi pelaksanaan sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) terhadap pendidikan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat/ mendukung implementasi pelaksanaan sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) terhadap pendidikan di Kabupaten Gowa di SMK Negeri 2 Somba Opu

Kabupaten Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan dari segi keilmuan/akademis:
  - a. Memperluas dan memperbanyak khazanah ilmiah keilmuan tentang kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sumber daya manusia.
  - b. Menjadikan pendorong bagi studi lebih lanjut untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.
2. Kegunaan dari segi praktis:
  - a. Untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penghambat dan pendukung dalam kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).
  - b. Menuangkan minat penulis yang ingin mengungkap mengenai kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi menurut Grindle dalam Akib (2010) merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane dalam Akib (2010) bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome.

Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, menurut Sabatier dalam Akib (2010) mengatakan bahwa implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Nugroho, 2009: 494-495).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu program.

## **2. Variabel dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Untuk mengetahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi maka diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu

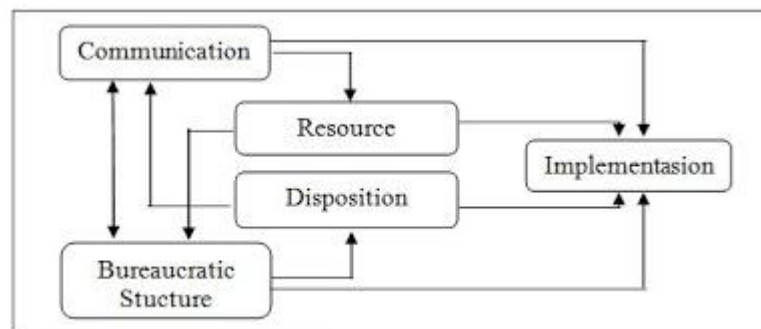


ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasinya. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan ?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan ?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy*

*implementors*) (Widodo,2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

#### b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-

aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.” Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan

untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang

tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Winter (dalam Peters and Pierre, 2003) memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

- 1) Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi;
- 2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional
- 3) Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

## **B. Konsep Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)**

### **1. Sistem Pembelajaran**

Istilah sistem dapat dimaknai sebagai suatu *entity* atau keseluruhan yang memiliki komponen-komponen saling berinterfungsi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen yang terdapat

dalam sebuah sistem saling bersinergi untuk mencapai sebuah tujuan. Pembelajaran, seperti yang telah dikemukakan, dapat dipandang sebagai sebuah sistem dengan komponen-komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran adalah tercapainya kompetensi atau penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh siswa yang diperlukan untuk melakukan tindakan atau pekerjaan.

Secara teknis, penilaian ketuntasan dilakukan berdasarkan penguasaan seluruh indikator untuk suatu kompetensi dasar (KD) yang dinyatakan dengan nilai ulangan yang sama atau diatas nilai KKM. Apabila nilai yang diperolehnya sama atau diatas nilai KKM bagi suatu standar kompetensi, maka peserta didik tersebut melanjutkan pembelajarannya ke standar kompetensi berikutnya. Apabila nilai yang diperoleh sama atau lebih tinggi dari KKM untuk satu mata pelajaran dalam satu semester maka peserta didik melanjutkan pembelajarannya ke semester berikutnya.

## **2. Kelas Tuntas Berkelanjutan**

### **a. Kelas**

Nawawi mengatakan bahwa “kelas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah, yang sebagai satu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, definisi kelas dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh empat dinding tempat sejumlah siswa yang berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar.
- 2) Kelas dalam arti luas yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar-mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan.

b. Tuntas

Tuntas artinya menyelesaikan pembelajaran seluruh mata pelajaran berdasarkan SKS (System Kredit Semester) pada kelas yang diikuti yang dinyatakan dalam kurikulum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013 pasal 1 menyatakan bahwa ketuntasan adalah menyelesaikan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sebagaimana yang dinyatakan dalam indikator setiap semester.

c. Berkelanjutan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013 pasal 1 bagian (15) menyatakan Berkelanjutan adalah peserta didik berhak mengikuti pelajaran atau mengambil kompetensi dasar tertentu pada kelas berikutnya walaupun terdapat kompetensi dasar yang belum dituntaskan atau belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal.



#### d. Kelas Tuntas Berkelanjutan

Menurut Hasan (2012:10) mengatakan bahwa “Kelas Tuntas Berkelanjutan (KTB) adalah proses pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai kualitas kemampuan yang dipersyaratkan kurikulum secara tuntas naik kelas secara otomatis dan menyelesaikan studi pada waktunya atau lebih cepat Seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 bagian (a) Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan komprehensif serta memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, perlu memberlakukan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013 Secara operasional, komponen Kelas Tuntas Berkelanjutan untuk setiap peserta didik yaitu:

- 1) Tuntas mencapai kualitas suatu mata pelajaran sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam Kompetensi Kelas Minimal (KKM).
- 2) Tuntas menyelesaikan pelajaran satu semester berdasarkan beban SKS yang dinyatakan dalam kurikulum.
- 3) Tuntas menyelesaikan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada kelas yang diikuti.

- 4) Berkelanjutan mengikuti pelajaran (kompetensi) pada kelas berikutnya walaupun pada akhir pembelajaran (semester/tahun), masih ada kompetensi dasar yang belum dituntaskan (belum memenuhi KKM) pada mata pelajaran tertentu.
- 5) Peserta didik tidak tinggal kelas dan tidak mengulang seluruh Mata Pelajaran di kelas tertentu, namun wajib menuntaskan kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu yang belum memenuhi KKB pada saat berada/duduk di kelas berikutnya.
- 6) Berkelanjutan meneruskan pendidikannya (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) ke jenjang pendidikan berikutnya dengan menuntaskan semua tagihan standar kompetensi pada setiap mata pelajaran kelas terakhir.

### **3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan**

#### **a. Kelebihan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan**

Menurut Hasan (2012:10) kelebihan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, yaitu:

- 1) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi.
- 2) Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan dan dapat menuntaskan pencapaian kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap kurikulum satuan pendidikan.

- 3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan suatu kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum waktunya untuk diberikan kesempatan mengambil kompetensi dasar berikutnya tanpa harus menunggu tahun pelajaran berikutnya/masa kenaikan kelas.
- 4) Membantu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional (intrapersonal), kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial (interpersonal), dan kecerdasan berbahasa) untuk pembentukan kepribadian bermoral, sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- 5) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional global.

b. Kelemahan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan

Selain kelebihan sistem kelas tuntas berkelanjutan, ternyata masih ada beberapa keganjalan dengan sistem ini, kelemahannya yaitu:

- 1) Kerang tersedianya fasilitas yang memadai dari pemerintah,
- 2) Guru terbebani karna banyak yang harus disiapkan tentang KHB (Kartu Hasil Belajar) dan KRB (Kartu Rencana Belajar).

4. Implementasi Pembelajaran kelas Tuntas Berkelanjutan

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan berpijak pada Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum dikembangkan

sekolah (KTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 dan 23 tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Satuan pendidikan mengembangkan KTSP sesuai dengan struktur kurikulum dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi (SI) memuat standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berisikan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Berdasarkan KD dan SK guru mengembangkan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

KTSP adalah kurikulum berdasarkan kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, proses pendidikan adalah upaya bersama antara guru dan peserta didik dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam KKM. Pencapaian kompetensi yang dinyatakan dalam KKM adalah karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi yang ingin direalisasikan melalui Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan KTB adalah strategi yang dinilai memiliki tingkat keberhasilan realisasi ide yang diinginkan kurikulum. Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan khususnya Kompetensi Kelas Minimal menjadi patokan untuk menyatakan bahwa kurikulum telah dilaksanakan pada jenjang kesuksesan implementasi yang tinggi dan peserta didik telah memiliki kualitas yang diinginkan kurikulum. Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas

Berkelanjutan berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mengenai sistem kredit semester dan satuan kredit semester. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Penyelesaian pembelajaran atau ketuntasan belajar dalam satu semester diukur dari jumlah kredit yang berhasil dikumpulkan peserta didik berdasarkan beban belajar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006

Beban belajar setiap mata pelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi jam pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tak terstruktur. Satuan kredit semester tatap muka adalah 45 menit untuk SMP/MTS dan 45 menit untuk SMA/MA, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan tidak terstruktur. Jumlah beban belajar dari keseluruhan mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan tidak boleh melebihi 32 sks untuk SMP/MTS, 38/39 sks untuk SMA/MA Prinsip yang harus dicermati di dalam Menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) didalam sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah (1) peserta didik menentukan sendiri beban belajar diatas beban minimal (2) peserta didik menentukan sendiri mata pelajaran pilihan yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat,

dan minatnya (3) peserta didik yang berkampuan dan berkemajuan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas berkelanjutan didasarkan pada: Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan provinsi. Landasan pedagogik Kelas Tuntas Berkelanjutan Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan didasarkan pada landasan pendidikan sebagai berikut: Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan

potensi peserta didik menjadi kualitas/lompetensi yang diharapkan masyarakat/bangsa. Kualitas yang diinginkan bangsa terumus dalam tujuan pendidikan nasional yaitu manusia beriman dan bertawa kepada tuhan yang maha esa, berakhlaq muia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kualitas belajar peserta didik yang dinyatakan dalam Tujuan Pendidikan Nasional dikembangkan dari proses pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar 9 Tahun sebagai kualitas dasar manusia Indonesia dan lanjutan pada Pendidikan Menengah 3 tahun. Kualitas hasil belajar dalam pengetahuan yang dinyatakan dalam Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang selalu dapat diperbaiki dan ditingkatkan setiap saat baik pada waktu oleh peserta didik, baik pada pada kelas yang dihadapi dikelas sesudahnya Kualitas hasil belajar yang terkait dengan kemampuan, nilai dan kebiasaan hanya dapat dikembangkan secara berkelanjutan dari kelas 1 (SD/MI) sampai minimal sampai tuntas wajib belajar 9 tahun. Peserta didik adalah subyek dalam belajar sehingga proses pendidikan harus menempatkan kepentingan belajar peserta didik sebagai yang utama. Sesuai dengan prinsip pendidikan, pengukuran hasil belajar dilakukan untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik pada satu titik wajtu sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Kurikulum adalah kurikulum sekolah di setiap jenjang pendidikan, bukan kurikulum kelas. Pelaksanaan Kelas Tuntas Berkelanjutan pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan pendidikan bagi semua peserta

didik yang memiliki kemampuan, kecepatan, maupun kualitas belajaran yang berbeda-beda. Identifikasi kelebihan dan kekurangan peserta didik yang dimaksudkan untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik, sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat bagi peserta didik. Perlakuan yang tepat, diharapkan akan terjadi:

- a. Minat peserta didik terhadap mata pelajaran,
- b. Kecepatan dalam belajar,
- c. Rasa ingin tahu,
- d. Kemampuan berpikir, dan
- e. Kemampuan kerjasama

Hasil analisis mengenai peserta didik yang telah dikemukakan di atas menjadi bahan masukan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan silabus dan RPP. Selain analisis kemampuan peserta didik, untuk mengembangkan silabus dan RPP yang sesuai untuk Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan, guru dan sekolah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada setiap awal tahun ajaran, guru dan kepala sekolah duduk bersama membahas perencanaan silabus dan RPP.
- b. Mengembangkan silabus berdasarkan hasil belajar

#### 5. Manfaat Kelas Tuntas Berkelanjutan

Sistem Pendekatan Kelas Tuntas Berkelanjutan memiliki beberapa keunggulan dan manfaat dibandingkan pendekatan yang berlaku di dalam



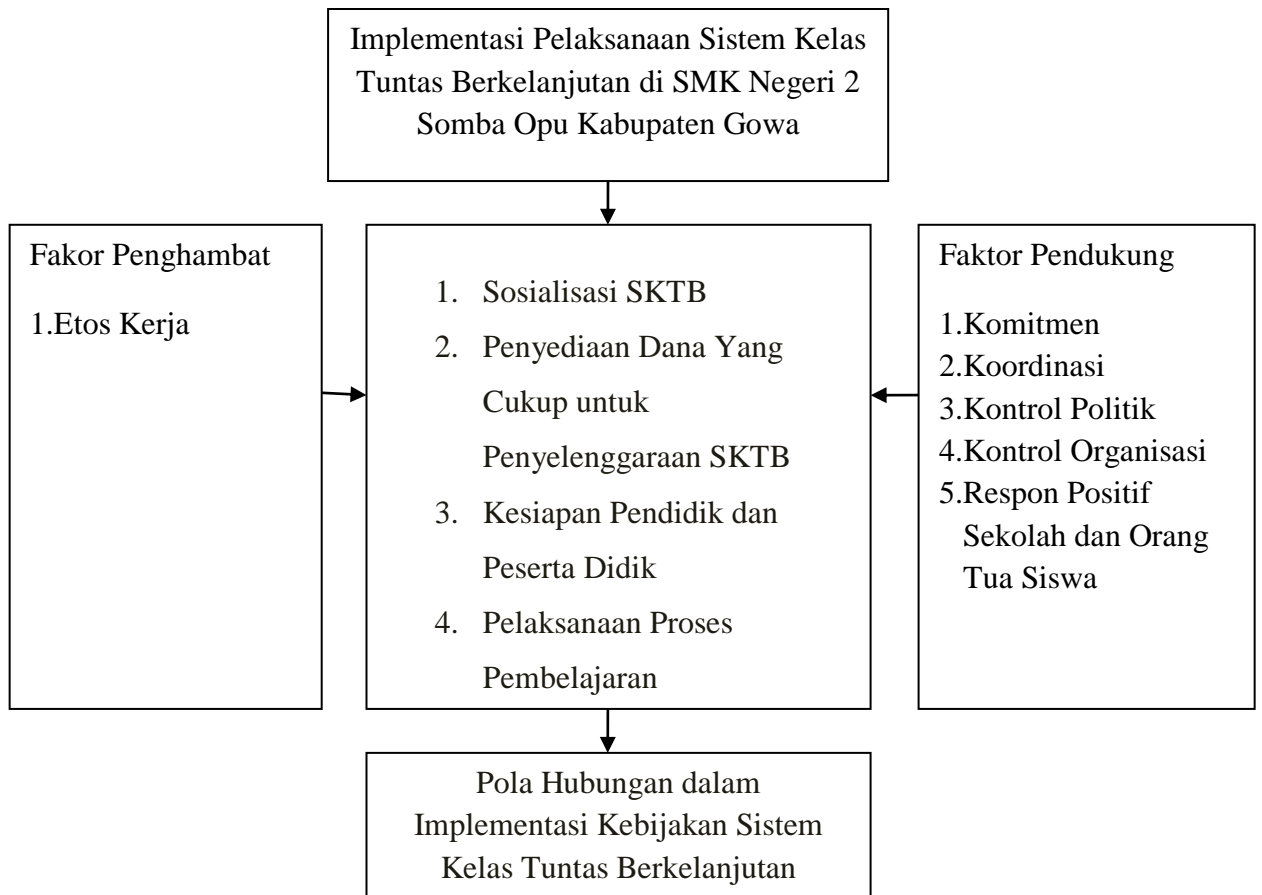
sistem yang umumnya dilakukan. Manfaat tersebut antara lain dikemukakan oleh Salam (2013:6):

- a. Peserta didik lebih ditantang untuk belajar mencapai standar kompetensi yang dinyatakan dalam Batas Minimal Pencapaian Kompetensi (C=2,0). Rasa percaya diri peserta didik menjadi lebih baik.
- b. Kualitas hasil belajar peserta didik lebih baik dan lebih tinggi serta terjamin oleh sekolah karena tidak ada peserta didik yang berkualitas di bawah Batas Minimal Pencapaian Kompetensi (C=2,0).
- c. Peserta didik lebih bertanggung jawab atas beban belajar yang menjadi tanggungjawabnya karena dalam Batas Minimal pencapaian Kompetensi (C=2,0) dan sikap bertanggungjawab menjadi sikap dirinya.
- d. Dengan pencapaian kualitas hasil belajar pada tingkat Batas Minimal Pencapaian Kompetensi (C=2,0) dan di atasnya, pada akhir tahun tidak ada peserta didik yang tinggal kelas karena mereka memenuhi persyaratan kenaikan kelas.
- e. Dengan Sistem Kresid Semester yang menjadi bagian terintegrasi dari Kelas Tuntas Berkelanjutan, peserta didik memiliki kesempatan untuk menyelesaikan lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk pengeluaran pribadi dapat dihemat.

Dalam pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan, peserta didik tidak berpindah ke kompetensi yang lain jika ia belum menguasai kompetensi tersebut.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pestaka dan hasil penelitian yang relevan. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berpikir sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini:



### D. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proposal ini adalah implementasi sistem kelas tuntas berkelanjutan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa.

## **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Implementasi adalah suatu kebijakan yang pelaksanaannya dari rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan telah ditetapkan.
2. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah proses pembelajaran yang berusaha membimbing peserta didik dalam menuntaskan semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan, tanpa harus ada tinggal kelas.
3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yaitu komitmen, koordinasi, kontrol politik dan organisasi serta respon positif dari sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa.
4. Faktor Penghambat kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan adalah etos kerja dari stakeholder yang masih sangat beragam serta adanya respon negative dari sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa.
5. Sosialisasi adalah proses pengenalan SKTB terhadap jajaran SKPD Kabupaten Gowa maupun PTN/PTS.
6. Penyediaan dana yang cukup untuk penyelenggaraan SKTB adalah sumber keuangan yang dikelola untuk digunakan dalam pelaksanaan SKTB dilapangan.
7. Kesiapan pendidik adalah etos kerja yang dimiliki oleh pendidik melalui beberapa pelatihan seperti workshop yang diberikan oleh pemerintah terkait pelaksanaan SKTB.

8. Etos Kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran yang dimiliki oleh setiap stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan SKTB terhadap sistem orientasi nilai budaya terhadap pekerjaan yang dihadapi.
9. Komitmen adalah Kemampuan dan kemauan dari para stakeholder yang terkait untuk menyelaraskan diri dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan SKTB
10. Koordinasi adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pelaksanaan SKTB dengan membentuk tim-tim khusus dan kepada merekalah pelaksanaan SKTB diintegrasikan.
11. Kontrol Politik yaitu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pihak DPRD sebagai pembuat kebijakan yaitu berupa pengawasan secara langsung dan rapat dengar pendapat.
12. Kontrol Organisasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang telah diintegrasikan kepada tim 11 sebagai tim pengawas bina yang bertugas untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SKTB di lapangan.
13. Respon Positif adalah respon yang baik dari sekolah maupun orang tua siswa berupa dukungan agar sistem ini tetap berjalan karena dianggap sangat membantu sekolah beserta pengembangan kemampuan belajar siswa.
14. Pola Hubungan yaitu pola hubungan yang dibangun dalam perjalanan kebijakan ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Somba Opu yang beralamat di Jl. Masjid Raya Kabupaten Gowa. Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan September – Oktober 2018

#### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang didukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka maka penelitian ini membutuhkan anaalisi yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

Tipe Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan fenomenologi bermaksud untuk mengeksplorasi fenomena dengan menggunakan teknik *Indepth Interview* (wawancara mendalam), dan melakukan observasi serta dokumentasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah staf bidang kebersihan. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan observasi, dan wawancara.
2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara menyatakan sesuatu kepada seseorang *responden*, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pihak terkait

#### **2. Observasi**

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, dalam melakukan observasi, penulis menggunakan pedoman observasi sebagai instrument pengamat. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan menggunakan pengumpulan data dokumentasi cenderung bersifat data sekunder. Misalnya, foto, video dan arsip. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

### **E. Informan**

Mengetahui penelitian bersifat kualitatif maka yang menjadi informan penulis adalah pihak terkait yang ada di Kabupaten Gowa. Obyek utama penelitian ini ialah implementasi sistem kelas tuntas berkelanjutan di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa dimana yang dimaksud di sini adalah orang diharapkan memberikan data secara obyektif, netral, dan dapat dipertanggung jawabkan Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa	1 Orang
2.	Kepala Sekolah	1 Orang
3.	Guru	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3 Orang</b>

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan komunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan pada informasi dengan mengacu interview yang telah di rumuskan peneliti.

### 2. Observasi

Teknik ini berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi. Data dan fakta akurat yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan/responden dan data dengan kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan tetap mengontrol keabsahannya. Survey diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan data-data dan laporan tertulis yang tersimpan sebagai arsip yang berkaitan dengan penelitian ini dengan kenyataan yang terjadi.



## **G. Keabsahan Data**

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya

### **2. Triangulasi Metode**

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidakakuratannya

### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa**

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :  
Tinjauan terhadap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Gowa dalam mengembangkan wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian, meliputi: aspek fisik wilayah, kependudukan dan

sumberdaya manusia, aspek perekonomian, potensi bencana alam dan berbagai aspek lainnya.

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang 90 km. di Kabupaten Gowa terdapat 18 wilayah kecamatan dan 168 desa/kelurahan.

## 2. Gambaran Umum SMKN 2 Somba Opu



Smk Negeri 2 Somba Opu adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terletak di Jalan Mesjid Raya No. 46 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Smk Negeri 2 Somba Opu berdiri sejak tahun 1989 di Kabupaten Gowa dengan status kepemilikan pemerintah setempat dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>. Pada tahun 2015 SMK Negeri 2 Somba Opu ini sudah terakreditasi “A”, dengan No. Sertifikasi ISO 9001:2008.

Smk Negeri 2 Somba Opu mempunyai SK penderian 0134/0/1989 dengan :

1. Guru : 91 Orang
2. Siswa Laki-Laki : 931 Orang
3. Siswa Perempuan : 575 Orang
4. Rombongan Belajar : 59
5. Kurikulum : KTSP
6. Penyelenggaraan : Sehari Penuh / 5 Hari
7. Ruang Kelas : 62 ruangan
8. Laboratorium : 1
9. Perpustakaan : 1

Kemudian organisasi yang ada di Smk Negeri 2 Somba Opu, yaitu :

1. Osis (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
2. Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera)
3. Rohani Siswa (Organisasi sekolah yang berhubungan dengan pelayanan rohani siswa).

## **B. Implementasi SKTB**

### 1. Sosialisasi SKTB

Sosialisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan suatu program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten Gowa dalam melakukan sosialisasi tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) telah menempuh perjalanan panjang yaitu dengan melakukan sosialisasi dimana-mana bukan hanya pada tataran PEMDA Gowa akan tetapi Pemerintah Kabupaten Gowa sangat gencar melakukan sosialisasi ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta serta beberapa sekolah yang ada dalam lingkup Kabupaten Gowa.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Somba Opu yang mengatakan:

“.....,SKTB sebagai Program unggulan pemerintah Kab. Gowa dibidang pendidikan harus disambut dengan baik oleh setiap sekolah. Terkhusus untuk SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa kami sangat mengapresiasi dan menyambut program ini dengan baik, dan berupaya untuk mengoptimalkan penerapan SKTB tersebut dari SKTB harus dipahami oleh semua pendidik maupun peserta didik agar niat baik dari SKTB tidak disalahgunakan, pemahaman bahwa tidak ada lagi tinggal kelas bukan alasan untuk bermalas-malasan melainkan yang harus dipahami bersama adalah keharusan bagi peserta didik menguasai KD yang telah ditentukan. Dasar pemikiran itulah sehingga kami menuntut kepada seluruh pendidik yang berda di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa untuk selalu belajar untuk menguasai program kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) ini, dan secara berkesinambungan tidak bosan memberikan pemahan kepada peserta didik tentang tujuan program SKTB tersebut.....” (KND, Guru, Wawancara tanggal 12 September 2018).

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa diatas dapat kita pahami bahwa keberadaan SKTB

sebagai program unggulan pemerintah Kab. Gowa dibidang pendidikan telah disambut dan diterapkan dengan baik di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa, pemahaman tentang dengan maksud dan tujuan dari program ini menjadi modal utama dalam penerapannya

“.....,Kurikulum yang berlaku saat ini di sekolah adalah kurikulum 2013 yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2006 (KTSP). Keberadaan SKTB ini tidak mengganggu kurikulum saat ini (K13) karena kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya dianggap sejalan dengan program pembelajaran SKTB. Kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik. Sementara SKTB diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan seimbang (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) .....” (YSF, Kepala Sekolah, Wawancara tanggal 12 September 2018).

Dari hasil wawancara bahwa Keberadaan SKTB dan kurikulum 2013 yang berlaku saat ini hampir bersamaan waktu pelaksanaannya SKTB di berlakukan sejak 2012 sedangkan K13 diterapkan tahun 2013. SKTB ini tidak menggagu kurikulum yang berlaku sebelumnya yaitu KTSP dan SKTB ini selalu mengedepankan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik seperti ysng terdapat pada K13 yaitu kognitif, afeksi dan psikomotorik.

”....., Adapun pelaksanaan dan pengolahan kurikulum telah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang diharapkan oleh pihak sekolah setelah disesuaikan dengan silabus yang telah disusun sebelumnya ini terjadi berkat kedisiplinan seluruh komponen sekolah mulai dari kepek, wakasek, pendidik, staf serta tata usaha sebagai tenaga penyelenggaraan pendidikan disekolah. Pengelolaan kurikulum ditetapkan sesuai dengan kalender akademik yang dikordinir oleh wakasek bidang kurikulum serta didukung sepenuhnya oleh para pendidik mata pelajaran.” (BDM, Sekdis Kabupaten Gowa, Wawancara tanggal 12 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pendidik di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum sebagai komponen SKTB berjalan dengan baik dan diharapkan akan membantu peserta didik untuk mampu menguasai KD yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan keberadaan SKTB tidak mengganggu kurikulum saat ini karena kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya dianggap sejalan dengan program pembelajaran SKTB.

## 2. Pemenuhan Dana Yang Cukup Untuk Penyelenggaraan SKTB

Dalam hal pemenuhan dana penyelenggaraan SKTB maka pemerintah Kabupaten Gowa telah menganggarkan semua kebutuhan pendanaan kepada APBD Kabupaten Gowa. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sekolah yang mengatakan:

“Dalam upaya pemenuhan dana SKTB ini kita kembali ke filosofinya, program SKTB itu adalah program pemerintah Kabupaten Gowa. Jadi otomatis bahwa semua kebutuhan penganggarnya itu diakomodir oleh PEMKAB Gowa.” (12 September 2018).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya pemenuhan dana penyelenggaraan SKTB, sumber pendanaan sepenuhnya di akomodir oleh APBD Kabupaten Gowa karena program ini adalah program andalan.

Kemudian dalam pemenuhan dana juga tidak serta merta diakomodir sepenuhnya oleh karena pemenuhan dana sepenuhnya diakomodir oleh APBD

tentunya tergantung dari kesiapan APBD di daerah itu sendiri hal ini kembali di perjelas oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Kemudian kendala dalam dana. Sebenarnya dalam penyelenggaraan dana kita tidak punya kendala karena ini program andalan kab.Gowa berarti ini adalah program prioritas. Maka kalau ini ada permintaan penganggaran dengan melihat out put dan in comenya seperti apa maka ini lebih dahulu di akomodir tapi bukan berarti kita mengabaikan program lain” (12 September 2018).

Dari hasil wawancara diatas kita bisa melihat bahwa pemenuhan dana/penganggaran biaya pelaksanaan SKTB sepenuhnya diakomodir oleh APBD yang berarti bahwa apakah kebutuhan pendanaan terpenuhi atau tidak tentu tidak terlepas dari besaran APBD yang dikelola oleh Kabupaten yang bersangkutan dalam hal ini kabupaten Gowa.

### 3. Kesiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk memaksimalkan Implementasi SKTB di lapangan, tentunya Kepala Sekolah dalam hal ini harus lebih fokus memperhatikan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan yang bersentuhan langsung dengan siswa di Sekolah. Dalam rangka mempersiapkan guru untuk melaksanakan SKTB di Sekolah, Kepala Sekolah telah mengikuti workshop yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dibenarkan oleh Pengelola dan Penanggung Jawab SKTB yang mengungkapkan:

“Untuk implemetasi SKTB khususnya sebenarnya ada pada kegiatan pendidik. Pada pendidik dilakukan workshop berkaitan format apa yang disiapkan, seperti apa pelaksanaannya dilapangan, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah dalam kelas, dibekali dalam workshop bukan hanya kepada pendidik tapi kepada kepala sekolah serta pengawasnya juga” (15 September 2018).



Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SKTB dilapangan maka hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesiapan pendidiknya karena pendidik yang bersentuhan langsung dengan peserta didik di sekolah oleh karena itu dalam rangka mempersiapkan pendidik Kepala Sekolah selalu mengikuti workshop yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang paling penting dalam pelaksanaan SKTB dilapangan, yaitu kesiapan pendidiknya oleh karena itu dalam rangka mempersiapkan pendidik Pemerintah mengadakan workshop yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan pengarahan tentang bagaimana menghadapi masalah yang terjadi dalam kelas.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Somba Opu sebagai berikut;

“Guru diberikan workshop sebelum pelaksanaan SKTB kemudian guru dilengkapi administrasi SKTB (klinik dini dan deteksi dini) untuk mendata kemampuan atau pemahaman peserta didik sebelum mulai pelajaran sampai setelah naik kelas (per semester)” (12 September 2018).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan SKTB para guru sudah dilengkapi administrasi SKTB (klinik dini dan deteksi dini) untuk mendata kemampuan atau pemahaman peserta didik sebelum mulai pelajaran sampai setelah naik kelas (per semester).

Bukan hanya tenaga kependidikan yang diperhatikan tetapi juga pendidik termasuk penilaian yang digunakan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu guru di SMKN 2 Somba Opu, yaitu :

“Penilaian yang digunakan yaitu menggunakan K13 dengan menggabungkan SKTB. Kalau saya pribadi bagaimana penilaiannya dari awal itu ada penilaian sikap namanya karena penilai dibagi atas beberapa bagaian yaitu keterampilan, Sikap dan pengetahuan. Mulai dari masuk siapa yang tidak membawa Alquran, tidak mengaji (tadarus) itu semua ada penilaiannya. Jadi memulai pelajaran ada penilaian. Cara mengolah data yang pertama ditinjau dari deteksi dininya, ada peserta didik yang karakternya memang tidak suka kerja tugas, kalo tidak suka kerja tugas maka kita mulainya dari awal sikapnya, kesehariannya malas atau tidak itukan membantu dia. Jadi kita gabungkan dari tidak malas dari yang malas dari nilai tugas, pr, ulang harian, ulangan tengah semester digabungkan nanti diakhir semester lalu dibagi dengan jumlah nilai/data yang telah diperoleh. Sehingga terdapatlah peserta didik yang tuntas dan tidak tuntas jika ada nilainya yang tidak tuntas maka dilakukan remedial (KND, Guru, Wawancara tanggal 12 September 2018)”

Sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan penilaian yang digunakan yaitu menggunakan kurikulum 2013 dengan penggabungan SKTB, dan penilaian dilaksanakan sejak awal proses belajar yang meliputi penilaian terhadap keterampilan, sikap dan pengetahuan peserta didik.

“Penilaian yang saya lakukan sejak masuk kelas yaitu yang pertama ialah kehadiran peserta didik, kehadiran peserta didik minimal 80 % kemudian dari tadarus yang dilakukan diawal sebelum proses pembelajaran berlangsung, keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung, tugas-tugas yang diberikan. Kemudian ulangan harian, ulangan mid semester, ulangan tengah semester dan ulangan semester (YSF, Kepala Sekolah, Wawancara tanggal 12 September 2018)”

Berdasarkan data diatas maka diketahui bahwa kehadiran menjadi penilaian paling utama, yang kemudian disusul sejauh mana kemampuan

peserta didik baik pada saat proses belajar berlangsung maupun pada saat pelaksanaan mid semester dan semester.

“Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur dari penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik, sehingga penilaian menjadi langkah terpenting untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan kepada peserta didik. Penilaian yang dilakukan meliputi keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, ulangan harian, mid semester dan semester, serta penilaian yang meliputi sikap dan etika peserta didik, baik pada saat mengikuti pembelajaran maupun ketika berada diluar kelas, tutur kata terhadap guru dan kepada teman-temannya (BDM, Sekdis Kabupaten Gowa, Wawancara tanggal 12 September 2018)”

Berdasarkan pendapat para pendidik maka dapat kita ketahui penerapan SKTB dalam Proses pembelajaran telah terlaksana dengan baik, ini dapat kita lihat dengan pemahaman pendidik tentang pentingnya penilaian dalam proses belajar mengajar di kelas.

#### 4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita dapat melihat pelaksanaannya di Sekolah dalam hal ini pelaksanaan SKTB tidak jauh berbeda dengan proses pembelajaran yang biasa tapi perbedaannya terletak pada maksimal tidaknya proses pembelajaran, bentuk ideal pelaksanaan SKTB dari Sistem Pendidikan yang pernah ada sebelumnya terletak pada tidak adanya siswa yang tinggal kelas oleh karena siswa yang tidak memenuhi standar kompetensi akan di maksimalkan melalui remedial setelah dilakukan evaluasi di akhir semester. Hal ini dibenarkan oleh Guru SMKN 2 Somba Opu, yaitu :

“Remedial dilakukan manakala ada siswa yang tak memenuhi KKM yang telah ditetapkan. Adapun pelaksanaan remedial kami lakukan dengan dua cara yakni: 1) manakala jumlah peserta didik yang remedial lebih banyak daripada yang tidak remedial maka dilakukan remedial ulang dengan penyajian materi dan bahasa yang lebih mudah dimengerti. 2) manakala jumlah peserta didik yang remedial sedikit saya alihkan ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas sebagai sesuai dengan materi yang belum dikuasai. Namun ketika dilakukan remedial dan terdapat seperti yang telah saya jelaskan maka metode yang sering digunakan adalah metode penugasan. Ada pendampingan masing-masing saat remedial seperti Ada tutor sebaya yaitu teman yang nilainya lebih tinggi (KND, Guru, Wawancara tanggal 12 September 2018)”

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat kita pahami bahwa remedial dilakukan ketika peserta didik tidak mencapai KKM yang telah ditetapkan, dan metode yang digunakan dalam remedial disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang tidak memenuhi KKM atau peserta didik yang harus remedial.

“Substansi dari SKTB adalah remedial. Remedial dilaksanakan dengan ketentuan misalnya ada peserta didik yang belum tuntas di KD 1, mereka belum paham maka diadakan remedial, kalau mereka belum paham lagi maka akan diadakan lagi remedial. Jadi substansi SKTB adalah remedial perbaikan pengulangan, pengulangan dan perbaikan. Namun pendidik mengalami kendala dalam segi waktu jika ada peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM maka pendidik dan peserta didik harus menuntaskan nilainya meskipun peserta didiknya sudah naik kelas. Waktu untuk menuntaskan KKM itu setelah beranjak ke kelas lain maka pendidik susah untuk mengulang pelajarannya yang tertinggal di kelas bawah, sehingga pendidik harus melakukannya diluar jam pelajaran (YSF, Kepala Sekolah, Wawancara tanggal 12 September 2018)”

Remedial menjadi kunci dari sistem kelas berkelanjutan (SKTB) dimana seluruh peserta didik mesti menguasai KD yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan remedial memegang peran penting demi mewujudkan hal tersebut, meskipun remedial mesti dilakukan diluar jam pelajaran yang telah ditentukan.

“Remedial/ klinik dini dilakukan ketika peserta didik tidak mencapai KKM. Seperti ketika ulangan harian jika terdapat peserta didik yang

tidak mencukupi nilai standar/nilai yang ditetapkan oleh pendidik maka diadakanlah remedial. Remedial yang saya lakukan yaitu dengan mengulang soal kembali yang jawabannya salah dengan menyederhanakan pertanyaan, namun jika nilainya masih belum mencapai standar maka diadakan lagi remedial tapi dengan metode dan media yang berbeda tergantung materi. Metode yang sering saya lakukan saat remedial yaitu menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan media audio visual (LCD) supaya peserta didik lebih cepat paham. Itu kalau banyak yang remedial tapi kalau jumlahnya sedikit saya memberikan tugas dan bimbingan khusus. Begitu pun ulangan mid, ulangan tengah semester, selain itu saya menggunakan tutor sebaya yaitu teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar lebih tinggi. Mereka saya suruh untuk memberikan tutorial kepada temannya yang mengalami keterlambatan belajar. Pendidik dan peserta didik melakukan remedial diluar jam mata pelajaran atau diluar jam sekolah (BDM, Sekdis Kabupaten Gowa, Wawancara tanggal 12 September 2018)”

Berdasarkan persepsi dari para pendidik menunjukkan pentingnya peran remedial demi keberhasilan sistem kelas berkelanjutan (SKTB), dari hal itu setiap pendidik melaksanakan remedial bagi setiap peserta didik yang tidak mencapai KKM.

### **C. Faktor-faktor yang Menghambat/ Mendukung Implementasi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten Gowa**

Winter (dalam Peters and Pierre, 2003) memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3(Tiga) variabel yang memengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni; Prilaku hubungan antar organisasi, prilaku implementor, dan prilaku kelompok

sasaran. Secara garis besar menurut pendapat yang dikemukakan oleh winter faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor yang Mendukung Pelaksanaan SKTB

##### a. Komitmen Stakholder Terkait.

Salah satu faktor dominan yang mendukung pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa yaitu dengan adanya komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa, hal ini di pertegas oleh Pengelola dan penanggung jawab SKTB Kabupaten Gowa yang menyatakan:

“Kalau masalah komitmen ya kami pasti telah berkomitmen untuk tetap menjalankan sistem ini walaupun program ini merupakan program yang dikeluarkan oleh bupati beserta DPRD karena kami menganggap bahwa sistem ini sangat cocok untuk dilaksanakan terutama karena tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas disamping itu ujian tidak lagi menjadi penentu kelulusan karena semua siswa akan dimaksimalkan melalui proses pembelajaran yaitu dengan adanya remedial secara terus menerus”(15 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak dinas telah berkomitmen untuk menjalankan program ini karena dianggap menguntungkan peserta didik karena tidak ada lagi siswa yang akan tinggal kelas karena semua akan dituntaskan dalam proses pembelajaran walaupun program ini adalah program inisiatif dari pemerintah daerah.

Kemudian hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Somba Opu yang menyatakan:

“Apapun sistem yang di terapkan maka kita dari pihak sekolah akan melaksanakan apalagi SKTB ini karena kami mengang-gap bahwa SKTB sangat bagus karena tidak mengenal istilah tinggal kelas, akan tetapi siswa juga tidak serta merta di naik-naikkan tapi siswa yang tidak tuntas pada mata pelajaran tertentu akan diberikan remedial sampai bisa menuntaskan semua mata pelajaran yang diberikan”(12 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak sekolah juga sangat mendukung program ini oleh karena sekolah menganggap sistem ini sangat membantu para siswa dalam hal penguasaan pelajaran yang diberikan oleh sekolah dengan adanya remedial sehingga semua siswa dapat menguasai pelajaran yang diberikan.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Pengelola dan penanggung jawab SKTB yang mengutarakan:

“Kalau berbicara masalah bentuk komitmen dalam pelaksanaan SKTB itu dapat dibuktikan dengan adanya fakta integritas kemudian nota kesepahaman dan juga adanya MoU antara Bupati, Dinas dan Sekolah atau Guru” (15 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk komitmen para stakeholder dalam pelaksanaan SKTB adalah adanya keinginan dari semua stakeholder untuk menjalankan sistem ini dan itu dapat dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman, fakta integritas dan MoU antar Bupati, Dinas dan Sekolah atau guru.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis dapat menganalisa bahwa semua stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan SKTB telah berkomitmen untuk menjalankan program ini di sekolah mulai dari tingkat pengawas, kepala sekolah beserta guru-

gurunya, karena mereka menganggap sistem ini sangat ideal untuk dilaksanakan oleh karena dalam sistem ini tidak mengenal istilah tinggal kelas karena semua siswa akan dimaksimalkan dalam proses pembelajaran melalui deteksi dini, klinik dini, remedial dan pengayaan sehingga siswa tidak serta merta dinaik-naikkan tapi melalui proses belajar yang maksimal hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman, fakta integritas dan MoU.

Menurut hasil observasi di lapangan terkait dengan komitmen para stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan SKTB ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua stakeholder sangat mengapresiasi program ini hal ini dibuktikan dengan adanya fakta integritas, nota kesepahaman beserta adanya MoU antar Bupati, Dinas beserta Sekolah/Guru, adapun model hubungan yang terjalin dalam implementasi program ini adalah model dominasi oleh karena program ini merupakan program yang murni disusun oleh pemerintah kemudian ditetapkan menjadi PERDA yang kemudian diberlakukan pada seluruh sekolah mulai dari tingkatan SD-SMP yang berada dalam naungan PEMDA Gowa.

b. Koordinasi antara pengawas dan pelaksana

Kemudian terkait koordinasi dalam pelaksanaan SKTB pemerintah telah mengatur sedemikian rupa kemana masalah yang timbul akibat pelaksanaan SKTB akan di koordinasikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang mengatakan:



“Dalam pelaksanaan SKTB ini kita membuat tim-tim khusus yang mempunyai fungsi masing-masing ada para pakar yang berjumlah 7 orang dan tersebar diperguruan tinggi se-indonesia, tim 11 sebagai tim pengawas bina dan ada tim 50 sebagai tim pengembang. Dan kepada tim inilah kita integrasikan pelaksanaan SKTB.”(12 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SKTB ini pemerintah telah mengkoordinasikan pelaksanaan SKTB pada perangkat-perangkat pelaksana yang ada. Dalam menjalankan sistem ini Pemerintah Kabupaten Gowa sangat jeli untuk memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan sistem ini dengan membentuk tim 11 sebagai tim pengawas bina tim 50 sebagai tim pengembang dan kepada tim inilah pelaksanaan diintegrasikan.

Hal ini kembali ditambahkan oleh pengelola dan penanggung jawab SKTB yang mengatakan:

“Kalau dari segi koordinasi kita melakukan presentase ke DPRD dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) karena pengawasan itu hak mereka yang membuat kebijakan ini” (15 September 2018)”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan SKTB lebih fokus pada pengawasannya sesuai dengan yang disampaikan diatas bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan adalah pihak Dinas melakukan presentase pada lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas kemudian dikaitkan dengan hasil observasi di lapangan penulis dapat

menganalisa bahwa terkait koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan SKTB itu lebih fokus pada langkah perbaikan, pengembangan terhadap hasil telaah dari pengawasan-pengawasan yang dilakukan baik dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai pembuat kebijakan maupun hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh tim-tim yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa.

c. Kontrol Politik

Kontrol Politik dalam pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa berupa tujuan-tujuan yang harus dicapai yang secara keseluruhan diatur dalam bentuk PERDA dengan lahirnya PERDA No.10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Hal ini dibenarkan oleh pengelola dan penanggung jawab SKTB yang menyatakan:

“Dari segi regulasi pemerintah daerah dengan adanya peraturan daerah No.10 Tahun 2013 yang dimana SKTB sudah menjadi program daerah yang telah dijalankan pada tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA baik itu negeri dan swasta. (15 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa telah diperkuat dengan adanya PERDA No.10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, hal ini yang menjadi dasar pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa.

Selanjutnya juga dibenarkan oleh ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gowa yang mengatakan:

“SKTB pada prinsipnya setelah diterbitkannya PERDA semua sekolah yang ada di Kabupaten Gowa mulai dari SD sampai

SMA/SMK diharuskan melaksanakan SKTB” (HG, 15 September 2018)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa setelah ditetapkannya PERDA No.10 Tahun 2013 Tentang sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan maka semua sekolah yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Gowa diwajibkan menjalankan SKTB, hadirnya PERDA ini semakin memperkuat dasar pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis dapat menganalisa bahwa terkait Kontrol Politik terhadap pelaksanaan SKTB yaitu dengan membuat PERDA No.10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, PERDA ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa dan mengatur apa yang menjadi Tujuan diadakannya sistem ini, tidak hanya sampai disitu selain memetapkan PERDA DPRD juga melakukan pengawasan berupa turun langsung ke lapangan serta mengadakan rapat dengar pendapat dengan Bupati serta DIKORDA Gowa sebagai Pihak pelaksana kegiatan dengan mengawasi pelaksanaannya di lapangan serta penggunaan APBDnya.

#### d. Kontrol Organisasi

Kontrol Organisasi dalam pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa berupa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pendampingan pada proses pelaksanaan kegiatannya. Hal ini

dibenarkan oleh sub bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang menyampaikan:

“Adapun pengawasan dilakukan oleh para pengawas sekolah. Pengawasan atau monitoring, evaluasi juga dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kabupaten Gowa. Bentuk evaluasi dalam pelaksanaan SKTB ditentukan sesuai dengan hasil monitoring tiap-tiap satuan pendidikan, hasil monitoring dianalisis sebagai hasil evaluasi untuk kemudian dijadikan rujukan dalam menentukan tindakan atau upaya selanjutnya”. (15 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan dilakukan oleh tim pengawas sekolah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, kemudian hasil monitoring dianalisis sebagai hasil evaluasi yang akan menjadi bahan rujukan dalam menentukan apa yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis dapat menganalisa bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan SKTB adalah melakukan evaluasi terhadap temua-temuan dilapangan yang sampaikan oleh tim-tim pengawas yang telah dibentuk yaitu tim 50 sebagai tim pengembang dan tim 11 sebagai tim pengawas bina di lapangan bertugas untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan SKTB di sekolah dan sekaligus melakukan evaluasi setiap semester yang kemudian diserahkan kepada pihak dinas dan ditelaah bersama kemudian menentukan tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan.

e. Respon Positif dari Sekolah dan orang tua siswa terhadap Pelaksanaan SKTB

Terkait pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa, untuk mencapai pelaksanaan yang efektif maka sangat diperlukan adanya respon yang baik dari pihak pelaksana dalam hal ini Sekolah merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan SKTB oleh karena itu respon baik dan dukungan dari pihak sekolah sangat dibutuhkan karena sekolah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaannya dilapangan. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Kurikulum SMKN 2 Somba Opu yang menyatakan:

“Program ini sangat bagus karena siswa mendapatkan penguatan dalam penguasaan mata pelajaran dengan adanya deteksi dini, klinik dini, remedial dan pengayaan sehingga siswa tidak ada lagi yang tinggal kelas karena siswa akan dimaksimalkan dalam proses pembelajaran”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sekolah/guru sangat mendukung program ini oleh karena tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas karena semua siswa akan dimaksimalkan dalam proses pembelajaran dengan adanya deteksi dini, klinik dini, remedial dan pengayaan.

Selanjutnya, juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Somba Opu yang menyatakan:

“SKTB adalah Sebuah Sistem yang memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada siswa karena adanya deteksi dini dan klinik dini tadi ditambah lagi ramedial yang dilakukan beberapa kali sampai siswa itu tuntas semua terhadap mata pelajaran yang diberikan”( 12 September 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah sebagai pelaksana SKTB menerima dengan baik program ini oleh karena tidak adalagi siswa yang akan tinggal kelas karena tidak mampu memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal oleh karena ketika ada siswa yang tidak memenuhi KKM maka akan dilakukan remedial jika setelah dilakukan remedial dan masih belum memenuhi KKM maka sekolah akan mengadakan pengayaan terhadap siswa sampai siswa itu bisa mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh Kurikulum yang berlaku.

Terkait pelaksanaan SKTB respon atau dukungan dari masyarakat/orang tua siswa yang merasakan langsung dampak dari pelaksanaan SKTB ini tidak bisa kita kesampingkan karena salah satu unsur yang dapat menjelaskan suksesnya sebuah program dapat diukur dari sejauh mana tingkat kepuasan pihak sasaran dalam hal ini yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat terutama orang tua siswa. Seperti dikutip dalam sebuah wawancara terhadap tokoh masyarakat yang mengatakan:

“Saya sebagai warga Kabupaten Gowa tentu merasa sangat bahagia dengan adanya program ini karena tidak adalagi anak sekolah yang tinggal kelas”(B, September 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu orang tua siswa yang mengatakan:

“Kami selaku orang tua siswa tentunya sangat senang dengan adanya program yang seperti ini karena kita tidak perlu takut lagi anak-anak tinggal kelas apalagi dibilang ada bimbingan tambahan jadi anak-anak tidak ketinggalan pelajaran yang kurang dimengerti”(N, September 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat sangat mengapresiasi SKTB ini terutama para orangtua siswa oleh karena tidak adalagi siswa yang tinggal kelas ditambah lagi siswa yang mendapatkan nilai rendah akan diberikan remedial dan pengayaan sehingga siswa dapat menguasai mata pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis dapat menganalisa bahwa salah satu indicator keberhasilan suatu kebijakan terletak pada respon yang baik atau dukungan dari kelompok sasaran, dalam hal ini pihak sekolah sebagai pelaksana tingkat bawah beserta orang tua siswa sangat mendukung terlaksananya sistem ini karena mereka menganggap bahwa siswa sangat diuntungkan dari segi pelayanan pendidikan, karena dalam sistem ini tidak dikenal istilah tinggal kelas kemudian siswa yang belum memenuhi standar kelulusan akan diramedial kembali oleh pihak sekolah sampai siswa tersebut bisa menuntaskan mata pelajaran yang diberikan. Jadi secara umum sistem ini memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal kepada siswa melalui proses pembelajaran yang diberikan.

## 2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan SKTB

### a. Etos Kerja dari Pendidik yang sangat beragam

Etos kerja adalah itikad baik dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya (mindset), dalam pelaksanaan SKTB etos kerja juga sangat dibutuhkan untuk dimiliki oleh para stakeholder yang terkait

dengan pelaksanaan SKTB di sekolah terutama pendidik yang bersentuhan langsung dengan siswa, oleh karena itu untuk merubah mindset pendidik pemerintah melakukan diklat atau workshop hal ini dibenarkan oleh Pengelola dan Penanggung jawab SKTB yang mengatakan:

“Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan SKTB di lapangan, maka hal pertama yang perlu kita rubah adalah merubah mindset para pendidik karena bagaimanapun hebatnya seorang guru dalam menghadapi siswa dalam kelas yang berjumlah 30-40 siswa yang heterogen tentu akan kewalahan juga oleh karena itu dalam mempersiapkan pendidik kita mengadakan diklat yang dibimbing langsung oleh para pakar SKTB”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan SKTB di lapangan tidak terlepas dari kesiapan para pendidik yang bersentuhan langsung oleh siswa di sekolah oleh karena itu untuk mempersiapkan pendidik, pemerintah melakukan diklat untuk merubah mindset para pendidiknya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Seksi Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang menyatakan:

“Jadi untuk memaksimalkan pelaksanaan SKTB dilapangan kita memberikan diklat kepada pendidik yang bersentuhan langsung dengan siswa, berkenaan dengan seperti apa pelaksanaannya dilapangan, bagaimana menghadapi masalah dalam kelas kemudian kita lengkapi dengan buku juknis 1-7”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan SKTB di lapangan, pemerintah terlebih dahulu merubah mindset para pendidiknya dengan mengadakan diklat.



Pendapat yang berbeda disampaikan oleh salah satu guru SD

Unggulan Paccinongan yang mengatakan:

“Adanya pro dan kontra dalam SKTB ini, karena ketidakpahaman mereka terhadap sistem ini. Padahal penguatan dalam sistem ini terdapat pada prosesnya. Terkadang juga ada guru yang pragmatis dan tidak lagi memikirkan kualitas. Padahal keberhasilan dan kegagalan sistem ini utamanya terletak pada dukungan dan kemampuan guru”.(A, 28 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas kemudian dikatkan dengan hasil observasi dilapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya guru/pendidik yang belum mengerti dan memahami SKTB ini terkait dengan pelaksanaan Workshop yang kurang maksimal walaupun telah diadakan secara berkelanjutan setiap tahunnya selain itu kesiapan para pendidik juga tidak terlepas dari personal/pribadi dari pelaksanaanya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Program SKTB yang diterapkan pemerintah Kab. Gowa untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kab. Gowa telah dipahami maksud dan tujuannya oleh pendidik dan peserta didik sehingga proses belajar mengajar terkhusus di SMP Negeri 1 Pallangga berjalan dengan baik dan lancar. Pemahaman peserta didik mengenai kewajiban menuntaskan setiap KD yang telah ditentukan membuat mereka tidak terbebani ketika diberikan remedial yakni dengan diberikan tugas untuk menuntaskan pembelajaran yang tertinggal. Tujuan belajar peserta didik bukan lagi berhasil melalui ujian semester untuk kemudian menjadi syarat naik kelas, dengan penerapan SKTB tujuan belajar peserta didik beralih bagaimana caranya untuk berhasil menuntaskan KD yang telah ditetapkan tanpa dihantui rasa takut tidak naik kelas. SKTB menjadi program unggulan pemerintah Kab. Gowa dibidang pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas secara intelektual, cerdas spritual dan cerdas secara emosional, yang kemudian menjadi bekal menghadapi persaingan di era globalisasi ini.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pendidik untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya terkhusus mengenai kemampuan dan pemahaman terhadap

SKTB, serta selalu memberikan pemahaman kepada peserta didik dan orangtua peserta didik mengenai fungsi dan tujuan dari SKTB. Setiap pendidik diharapkan selalu saling bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Selain itu, dalam meningkatkan kompetensi maka setiap peserta didik agar lebih sering mengikuti berbagai pelatihan yang ada, yang dapat melatih atau meningkatkan kemampuan mereka.

2. Penulis yakin akan skripsi yang telah dibuat ini masih terdapat banyak kekurangan yang ada di dalamnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca, sehingga penulis dapat memperbaikinya serta dapat menghasilkan karya yang lebih baik.
3. Sehubungan dengan pengembangan pendidikan di Indonesia, penulis mengharapkan dengan adanya karya ini dapat memberikan motivasi kepada para pembaca untuk senantiasa aktif mencari dan mengkaji hal-hal yang baru dalam proses pendidikan dan pengajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Diakses tanggal 02 Februari 2019
- Buku Panduan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (Automotic Promotion)
- Buku, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Fisipol Unismuh Makassar.
- Bungin, M. B. 2013. *Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Hakim, Lukman. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Sketsa Teori dan Pendekatan*. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nawawi, Hadari.2005. *Penelitian Terapan*, Jogjakarta : UGM Press
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 *Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan*.
- Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 *Tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)*
- Peters, B. Guy and Jon Pierre. 2003. *Handbook of Public Administration*. London : SAGE Publications.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Widodo, 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang : Bayu Media.